ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PAJAK DAN UTANG PERDATA OLEH DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT

Kepailitan sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yaitu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesan hartanya dilakukan oleh kurator dibawah hakim pengawas. Debitor yang pailit mengalami pembatasan dalam pengelolaan asetnya, yang berpotensi mempengaruhi hak-hak kreditor, baik yang berasal dari utang pajak maupun utang perdata. Permasalahan yang di teliti didalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan kewajiban pembayaran utang pajak dan utang perdata oleh debitor yang dinyatakan pailit, serta konsep pemenuhan pembayaran utang yang adil ketika debitor dinyatakan pailit. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan pemenuhan kewajiban pembayaran utang pajak dan utang perdata oleh debitor yang dinyatakan pailit terlebih jika diketahui terdapat lebih dari satu kreditor preferen pada sebuah perseroan yang pailit serta pemenuhan utang yang adil terhadap para kreditor-kreditornya.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait serta menganalisis hasil wawancara mengenai praktik peraturan perundang-undangan didalam penelitian ini, dengan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dengan memfokuskan penelitian kepada studi kepustakaan dengan menggunakan sumber-sumber dari data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun utang pajak sebagai kreditor preferen memiliki hak istimewa untuk didahulukan pembayaran utangnya dari kreditor-kreditor lain, disatu sisi juga terdapat kreditor preferen pada utang perdata yang juga memiliki hak mendahulu untuk pembayaran utangnya, hal ini menyebabkan kurator mengalami kebingungan pada saat akan melakukan pembagian harta debitor pailit, terlebih jika diketahui harta debitor pailit tidak mencukupi untuk membayar semua utang kreditor. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh debitor dan kreditor dalam proses penyelesaian utang, serta perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan praktik hukum terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran utang dalam konteks kepailitan.

Kata Kunci: Utang Pajak, Utang Perdata, Kepailitan

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE FULFILLMENT OF TAX DEBT OBLIGATIONS AND CIVIL DEBTS BY DEBTORS DECLARED BANKRUPT

Bankruptcy according to Law Number 37 Year 2004 is a general confiscation of all assets of a bankrupt debtor whose management and administration is carried out by a curator under a supervisory judge. Bankrupt debtors experience restrictions in the management of their assets, which have the potential to affect the rights of creditors, both those from tax debts and civil debts. The problem examined in this research is to analyze the implementation of the fulfillment of tax debt and civil debt payment obligations by debtors declared bankrupt, as well as the concept of fulfilling fair debt payments when the debtor is declared bankrupt. This research aims to examine and analyze the implementation of the fulfillment of obligations to pay tax debts and civil debts by debtors declared bankrupt, especially if it is known that there is more than one preferred creditor in a bankrupt company and the fulfillment of fair debts to its creditors. The research method used is an empirical juridical approach by examining and analyzing related laws and regulations and analyzing the results of interviews regarding the practice of laws and regulations in this study, using qualitative data analysis techniques by focusing research on literature studies using sources of secondary data. The results of this study show that although tax debts as preferred creditors have the privilege of prioritizing the payment of their debts from other creditors, on the one hand there are also preferred creditors in civil debts who also have prior rights to payment of their debts, this causes the curator to experience confusion when distributing the bankrupt debtor's assets, especially if it is known that the bankrupt debtor's assets are insufficient to pay all creditors' debts. In addition, this research also identifies the challenges faced by debtors and creditors in the debt settlement process, as well as the need for harmonization of related laws and regulations to create legal certainty for all parties involved. Thus, this research is expected to contribute to the understanding and practice of law related to the implementation of debt payment obligations in the context of bankruptcy.

Keywords: Tax Debt, Civil Debt, Bankruptcy